

Nama : Resti Apriliyani

NPM : 2523031007

1. Hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dengan kurang optimalnya pendidikan Kewarganegaraan dan IPS

Rendahnya partisipasi politik generasi muda memiliki hubungan yang sangat kuat dengan bagaimana pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan IPS diterapkan di sekolah. Pada banyak kasus, pembelajaran kedua mata pelajaran ini masih berlangsung secara tradisional: guru menjelaskan konsep-konsep demokrasi, norma hukum, lembaga negara, serta kewarganegaraan secara normatif dan berorientasi hafalan. Model pembelajaran seperti ini membuat siswa hanya mengetahui politik sebagai “pengetahuan di buku,” bukan sebagai realitas hidup yang perlu mereka pahami dan sikapi secara kritis. Padahal, menurut Print (2007), pendidikan kewarganegaraan seharusnya menumbuhkan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* yang hanya dapat muncul dari pengalaman partisipatif, bukan hafalan semata.

Akibat metode yang tidak kontekstual itu, siswa tidak mampu menghubungkan isu-isu yang mereka pelajari dengan dinamika politik yang mereka lihat di masyarakat dan media sosial. Mereka jarang diajak mendiskusikan kasus-kasus mutakhir seperti *golput*, misinformasi politik, atau peran pemilih pemula dalam pemilu. Hilangnya ruang dialog dan refleksi membuat generasi muda tumbuh tanpa “bahasa politik” yang dapat mereka pakai untuk memahami dunia publik. Penelitian Sari & Rifa'i (2020) menunjukkan bahwa minimnya pendidikan politik di sekolah menyebabkan siswa merasa politik adalah sesuatu yang rumit, kotor, dan jauh dari kehidupan pribadi mereka.

Selain itu, tidak adanya praktik seperti simulasi pemilu, kunjungan ke lembaga pemerintahan, atau latihan analisis kebijakan publik mengakibatkan siswa tidak memiliki kompetensi politik yang fungsional. Mereka menjadi kelompok yang ragu untuk berpartisipasi, mudah terpengaruh misinformasi, atau menganggap suara mereka tidak akan mengubah apa pun. Dengan demikian, kurang optimalnya pendidikan PKn dan IPS menciptakan kesenjangan antara pengetahuan dan kesadaran, yang akhirnya berkontribusi langsung terhadap rendahnya partisipasi politik generasi muda di Indonesia (Nugroho, 2019).

2. Dampak jangka panjang pemberian praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia

Pemberian praktik politik uang membawa dampak jangka panjang yang sangat serius bagi kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Ketika politik uang dianggap sebagai hal yang lumrah, demokrasi tidak lagi berjalan sebagai kompetisi gagasan, melainkan kompetisi modal. Demokrasi menjadi rentan terhadap oligarki ekonomi, karena kandidat dengan sumber daya besar lebih mudah membeli suara dan meraih kekuasaan. Fenomena ini telah dijelaskan oleh Schaffer (2007), bahwa politik uang pada akhirnya memperkuat ketimpangan dan menurunkan kualitas representasi rakyat.

Dalam jangka panjang, politik uang mendorong politisi melakukan berbagai praktik korupsi untuk mengembalikan biaya politik yang mereka keluarkan. Dana kampanye yang besar dianggap sebagai “investasi” yang harus balik modal, sehingga korupsi anggaran, jual beli jabatan, dan manipulasi kebijakan menjadi hal yang sulit dipisahkan dari kekuasaan. Ketika praktik-praktik ini berlangsung secara sistematis, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Transparency International (2023) menegaskan

bahwa negara-negara dengan toleransi tinggi terhadap politik uang memiliki skor indeks persepsi korupsi yang buruk dan tingkat kepercayaan publik yang rendah.

Tidak hanya itu, pemberian politik uang merusak penegakan hukum. Pelaku politik uang sering kali lolos dari sanksi karena lemahnya pengawasan, minimnya bukti, atau adanya intervensi kepentingan politik. Masyarakat menjadi sinis terhadap proses pemilu dan menganggap hukum hanya tajam ke bawah. Bila hal ini terus berlanjut, demokrasi Indonesia berisiko mengalami *democratic backsliding* yakni kemunduran demokrasi secara perlahan dari dalam, tanpa perlu perubahan rezim secara drastis (Levitsky & Ziblatt, 2018). Lebih buruk lagi, generasi muda akan tumbuh dalam budaya politik yang transaksional. Mereka belajar bahwa cara tercepat meraih kekuasaan bukan melalui integritas, kapasitas, atau ide, tetapi melalui uang. Ini adalah ancaman jangka panjang bagi moralitas politik bangsa. Demokrasi pada akhirnya bukan hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga kehilangan harapan.

3. Tinjauan kasus dari perspektif politik, hukum, dan kewarganegaraan serta bagaimana ketiganya bersinergi

Dari perspektif politik, rendahnya partisipasi pemuda dan maraknya politik uang menunjukkan bahwa kompetisi politik di Indonesia masih didominasi pola patronase. Partai politik masih gagal menjadi institusi pendidikan politik bagi warga, terutama generasi muda. Mereka lebih sibuk mengamankan suara melalui cara-cara pragmatis ketimbang mempromosikan gagasan dan kader berkualitas. Dari perspektif hukum, masalah utama terletak pada lemahnya penegakan Undang-Undang Pemilu, termasuk ketidakcukupan bukti, keterbatasan pengawasan di daerah, dan kurangnya deterrent effect dari sanksi. Kajian Bawaslu (2022) menyebut bahwa pembuktian politik uang sering kali terhambat oleh budaya masyarakat yang tidak mau melapor dan adanya relasi kuasa dengan para kandidat. Sementara dari perspektif kewarganegaraan, generasi muda belum memiliki kecakapan literasi politik termasuk literasi media, literasi hukum, dan literasi demokrasi. Padahal, dalam teori *civic empowerment* (Kahne & Westheimer, 2015), warga negara yang berdaya harus mampu memahami isu publik, mengkritisi kekuasaan, serta mengambil tindakan kolektif untuk memperbaiki keadaan.

Ketiga bidang ini sebenarnya dapat saling menguatkan. Ilmu politik memberikan kajian tentang struktur kekuasaan dan perilaku elite politik. Hukum menyediakan kerangka normatif dan instrumen sanksi. Pendidikan kewarganegaraan memastikan warga negara memiliki kemampuan, sikap, dan kesadaran untuk mengawasi proses demokrasi. Bila ketiganya bersinergi misalnya melalui kolaborasi sekolah dengan Bawaslu dan KPU, atau penguatan regulasi dan pendidikan politik maka praktik politik uang dapat ditekan dan partisipasi generasi muda dapat meningkat.

4. Program berbasis sekolah untuk meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa

Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah Program Sekolah Demokrasi Aktif. Program ini menggabungkan pembelajaran teori kewarganegaraan dengan praktik nyata dan kegiatan berbasis proyek. Pengajaran demokrasi tidak lagi hanya melalui modul, tetapi melalui aktivitas seperti simulasi pemilu sekolah, debat kandidat OSIS, kelas cek fakta berita politik, hingga proyek riset kecil tentang perilaku pemilih lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *experiential civic education* yang dikemukakan oleh Dewey (1916), bahwa warga negara hanya dapat tumbuh melalui pengalaman langsung dalam komunitas demokratis. Dengan metode seperti ini, siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi, tetapi juga merasakannya,

melakukan praktiknya, dan merenungkannya. Pembelajaran menjadi aktif, kritis, dan relevan dengan kehidupan mereka sebagai pemilih pemula.

Program ini juga dapat bekerja sama dengan lembaga seperti Bawaslu, KPU, dan organisasi masyarakat sipil agar siswa belajar langsung tentang pengawasan pemilu, bahaya politik uang, serta pentingnya partisipasi etis dalam demokrasi. Evaluasi dilakukan bukan melalui tes pilihan ganda, tetapi melalui portofolio reflektif, laporan analisis kasus, presentasi, dan karya proyek. Dengan demikian, sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan politik, tetapi juga membentuk karakter demokratis dan kecakapan hukum generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu RI. (2022). *Laporan Pengawasan Pemilu dan Penanganan Pelanggaran*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
- Kahne, J., & Westheimer, J. (2015). “Civic Education and the Future of Democracy.” *Theory and Research in Social Education*, 43(1), 1–21.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. New York: Crown.
- Nugroho, H. (2019). *Pendidikan Politik bagi Generasi Muda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Print, M. (2007). *Civic Education and Youth Participation*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Sari, D. & Rifa'i, M. (2020). “Literasi Politik Siswa SMA.” *Jurnal Civic Culture*, 4(2), 112–125.
- Schaffer, F. (2007). *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Boulder: Lynne Rienner.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index Report*. Berlin: Transparency International.